

Konflik Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat Helong dalam Kebijakan Pembangunan Bendungan Kolhua 2010-2022

Polikarpus John Baun

Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Email: joybaun1@gmail.com

Abstrak

Studi ini membahas tentang konflik yang terjadi antara pemerintah daerah (Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan masyarakat adat Helong dalam kebijakan pembangunan Bendungan Kolhua di Kota Kupang yang terjadi dari tahun 2010-2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi akar konflik yang menjadi penyebab dari konflik yang berkepanjangan ini. Studi ini dilakukan di wilayah perencanaan pembangunan Bendungan Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan teori konflik A.H.J. Dorsey diperkuat dengan teori konflik Simon Fisher. Hasil penelitian dan analisis data ini menemukan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat Helong ini terjadi antara lain; *Pertama*, adanya perbedaan pemahaman dan pengetahuan, pemerintah daerah menilai wilayah ini cocok digunakan untuk pembangunan bendungan namun masyarakat adat Helong menilai bahwa lahan ini tidak cocok dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Helong. *Kedua*, perbedaan nilai, bendungan yang bagi pemerintah bernilai dan berpotensi mengembangkan ekonomi masyarakat setempat dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Kupang, namun bagi masyarakat adat bernilai historis bagi sejarah kesukuan Helong sehingga apabila bendungan dibangun maka akan menghilangkan tanah adat mereka dari Kota Kupang. *Ketiga*, perbedaan kepentingan, pemerintah berpendapat bahwa dengan dibangunnya bendungan maka akan memberikan keuntungan dan manfaat besar bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air, peningkatan perekonomian dan terbukanya potensi lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar khususnya serta juga masyarakat Kota Kupang pada umumnya. Selain itu dapat menambah aset pariwisata Kota Kupang yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan masyarakat adat Helong merasa dirugikan dengan dibangunnya bendungan karena lahan pertanian dan perkebunannya akan ditenggelamkan, selain itu kampung adat leluhur dan pekuburan leluhur di dalam lahan perencanaan bendungan juga akan hilang tenggelam. *Keempat*, Persoalan Pribadi atau Latar Belakang Sejarah, pemerintah menilai bahwa konflik terjadi karena adanya ketersinggungan warga Kolhua terkait peristiwa masa lalu ketika anggaran pembangunan bendungan Kolhua dialihkan ke pembangunan Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang. Serta ketersinggungan masyarakat Kolhua terkait penggunaan media massa oleh pemerintah dalam memberitakan perencanaan pembangunan bendungan Kolhua yang memprovokasi warga Kolhua dan warga Kota Kupang secara keseluruhan yang memberitakan aksi penolakan masyarakat adat Helong di Kolhua. Pemerintah juga menilai bahwa dengan adanya penolakan yang terus menerus ini dari waktu ke waktu membuat masyarakat adat Helong dan Kolhua pada umumnya tidak lagi dapat bekerjasama sehingga pemerintah sendiri pada akhirnya memilih mendiadakan permasalahan ini

untuk sementara waktu dan saling menunggu kepastian pembangunan bendungan ini. Sedangkan masyarakat adat menilai pemerintah telah menggunakan media massa dengan sewenang-wenang tanpa adanya klarifikasi dan persetujuan warga dalam pemberitaan perencanaan Bendungan Kolhua seolah-olah warga menyetujui dan sudah final keputusannya padahal warga masyarakat adat menolak. Masyarakat juga menilai komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat yang tidak terbuka dan ada indikasi ketidakjujuran pemerintah terkait proses perencanaan pembangunan. Masyarakat adat juga mencontohkan beberapa pengalaman buruk masyarakat di daerah lain di Nusa Tenggara Timur yang memberikan lahan bendungan mereka yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan bendungan sesuai janji yang disampaikan pemerintah sebelum membangun. Hal ini kemudian menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan yang membuat trauma dan ketakutan masyarakat untuk menyerahkan lahannya untuk pembangunan bendungan.

Kata Kunci : *Konflik Pemerintahan Daerah, Masyarakat Adat, Kebijakan*

Abstract

This study discusses the conflicts that occurred between the local government (Kupang City Government and East Nusa Tenggara Provincial Government) and the Helong indigenous people in the Kolhua Dam development policy in Kupang City which occurred from 2010-2022. This research was conducted to explore the root of the conflict which is the cause of this prolonged conflict. This study was conducted in the Kolhua Dam development planning area, Kolhua Village, Kupang City, East Nusa Tenggara Province using a qualitative research method with an explanatory design. The process of collecting data is done by in-depth interviews. Data analysis uses conflict theory A.H.J. Dorsey is strengthened by Simon Fisher's conflict theory. The results of this research and data analysis found that the conflicts that occurred between the local government and the Helong indigenous people occurred, among others; First, there are differences in understanding and knowledge, the local government considers this area suitable for dam construction but the Helong indigenous people consider that this land is not suitable and has the potential to threaten the survival of the Helong indigenous people. Second, the difference in values, the dam which for the government is valuable and has the potential to develop the local community's economy and is beneficial for the interests of the people of Kupang City, but for indigenous peoples it has historical value for the history of the Helong tribe so that if the dam is built it will remove their customary land from Kupang City. Third, differences in interests, the government is of the opinion that the construction of a dam will provide great benefits and benefits for the community in meeting water needs, increasing the economy and opening up new job opportunities for the surrounding community in particular and also the people of Kupang City in general. In addition, it can add to Kupang City's tourism assets which have the potential to increase regional income. While the Helong indigenous people feel disadvantaged by the construction of the dam because their agricultural land and plantations will be submerged, in addition to that, the ancestral traditional village and ancestral graves in the dam planning area will also be lost. Fourth, Personal Issues or Historical Background, the government considers that the conflict occurred because of the Kolhua residents' resentment regarding past events when the budget for the construction of the Kolhua dam was diverted to the construction of the Tilong Dam in Kupang Regency. As well as the resentment of the Kolhua people regarding the use of mass media by the government in reporting on the Kolhua dam development plan which provoked Kolhua residents and residents of Kupang City as a whole who reported the action against the Helong indigenous people in Kolhua. The government also considers that with this continuous rejection from time to time, the Helong and Kolhua indigenous peoples in general are no longer able to work together so that the government itself ultimately chooses to silence this issue for the time being and wait for confirmation on the construction of this dam. Meanwhile, indigenous peoples believe that the government has used the mass media arbitrarily without any clarification and approval from the residents in reporting on the Kolhua Dam planning as if the residents agreed and the decision was final, even though the indigenous people refused. The community also assesses that the communication between the local government and the community is not open and there are indications of government dishonesty regarding the

development planning process. Indigenous peoples also gave examples of some of the bad experiences of people in other areas in East Nusa Tenggara who gave their dam lands that could not enjoy the results of dam construction according to promises made by the government before building. This then becomes an unpleasant experience that traumatizes and scares the community into giving up their land for the construction of the dam.

Keywords: *Regional Government Conflicts, Indigenous Peoples, Policies*

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan Bendungan Kolhua di Kota Kupang telah dimulai sejak awal perencanaan pembangunan bendungan ini, yang bermula dari pembahasan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi warga Kota Kupang sejak tahun 1995 (Kelen, Yoseph. 2015. Atasi Krisis Air). Namun pembahasan baru dimulai pada tahun 2008 ketika Pemerintah Kota Kupang berencana untuk membangun bendungan di Kelurahan Kolhua, karena wilayah tersebut memiliki letak yang strategis dan sangat memungkinkan untuk pembangunan bendungan. Pada tahun 2010 rencana pembangunan bendungan Kolhua secara intensif mulai dibahas oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui usulan dari Pemerintah Kota Kupang dalam rapat sinkronisasi program rencana pembangunan Bendungan Kolhua. Mulai pada saat itu masyarakat adat Helong yang bermukim di wilayah daerah perencanaan bendungan mulai melakukan penolakan. Konflik ini kemudian selalu timbul tenggelam dalam beberapa kali fase konflik selama dua belas tahun terakhir ini. Meskipun masyarakat adat terus menolakan perencanaan pembangunan bendungan terus dianggarkan setiap tahunnya. Hingga saat ini Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian PUPR masih belum dapat menemukan solusi yang tepat guna mencapai kesepakatan dengan masyarakat Kolhua. Hal ini berdampak pada terjadinya konflik yang semakin berkepanjangan.

Untuk memahami kronologi konflik yang terjadi selama 12 tahun (2010-2022) ini peneliti membagi ke dalam 3 fase konflik. **Fase Pertama** konflik antara pemerintah dan masyarakat adat (2010-2014). Konflik diawali dengan penolakan dari masyarakat dalam hal ini (Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua) yang anggotanya terdiri dari mahasiswa dan Serikat Tani Kolhua di bawah pimpinan Ketuanya Aleksius Bistolen (Messak, Zaimon. 2013. Ratusan Warga). Gubernur NTT saat itu Frans Lebu Raya dan Walikota Kupang saat itu Jonas Salean dalam periode pemerintahan mereka saat itu mendukung dan melanjutkan perencanaan pembangunan Bendungan Kolhua. Survei dan pemetaan kelayakan lokasi mulai dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian PUPR. Kemudian pada tahun 2014 saat terpilihnya Presiden Jokowi periode pertama, program pembangunan bendungan ini merupakan salah satu program Nawacita Presiden Jokowi (Kelen, Yoseph. 2015. Atasi Krisis Air). Konflik pada waktu itu terjadi setidaknya 300-an massa dari Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua menggelar aksi massa di kantor Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alasan penolakan masyarakat pada waktu itu karena tiga alasan. **Pertama**, lahan seluas 118 hektar, yang nantinya akan menjadi lokasi pembangunan, adalah milik masyarakat secara turun-temurun (tanah adat) yang digunakan untuk pertanian. **Kedua**, sebagian wilayah lokasi pembangunan adalah lokasi pemukiman penduduk. Artinya, jika proyek pembangunan tetap dilakukan, berarti ada penggusuran terhadap warga. **Ketiga**, struktur tanah lokasi dimaksud kurang cocok untuk pembangunan bendungan. Dalam aksinya, Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua menggelar ritual adat sebagai bentuk penolakan. Walikota Kupang saat itu tidak keluar menemui massa aksi. Massa aksi Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua kemudian menggeser aksinya ke kantor DPRD Kupang. Dalam dialog tersebut, pihak DPRD Kupang menyatakan dukungan terhadap rakyat terkait penolakan pembangunan bendungan Kolhua. (Danu, Mahesa. 2013. Front Rakyat Kolhua). Aksi penolakan warga pada fase ini juga masih terus dilakukan hingga pada

November 2014 Maxi Boifenadan warga Kolhua mendatangi Lopo Cerdas Nasdem di Sekertariat Nasdem NTT meminta partai Nasdem mengawal aspirasi masyarakat Kolhua yang menolak pembangunan bendungan Kolhua. Menurut Maxi, dirinya meminta kepada Viktor Laskodat pengurus DPD partai Nasdem saat itu yang semanjak awal rencana pembangunan bendungan kolhua sangat menolak agar tetap eksis memperjuangkan penolakan tersebut (Ryan Nong. 2021. Pembangunan bendungan.).

Fase kedua(2015-2017), pada Agustus 2015 Wali Kota Kupang Jonas Salean beraudiensi dengan masyarakat Kolhua namun mereka tetap menolak rencana pembangunan bendungan tersebut. Maxi Melianus Buifena, salah satu masyarakat disitu meminta Pemerintah Kota Kupang meneliti kembali rencana pembangunan bendungan tersebut, sebab masih ada warga yang tinggal di lokasi pembangunan bendungan. Maxi menolak rencana pembangunan bendungan lantaran akan menenggelamkan rumah warga sekitar yang berada di atas ketinggian 40 meter. Pemerintah Kota Kupang pada waktu itu tetap melakukan pengukuran di area yang akan dibangun Bendungan Kolhua. Sebab, data-datanya akan segera dikirimkan ke pemerintah pusat. (Seo, Yohanes. 2015. Takut ditenggelamkan). Konflik terjadi ketika beberapawarga masyarakat setuju menerima ganti rugi yang telah disiapkan Pemerintah Kota Kupang serta menandatangani persetujuan ganti rugi lahan namun beberapa warga menolak. Diantaranya Ferdy Taklalu, warga RT 23, Ketua RT 27/RW 8, Alexius Bistolen (46), Alex Tabana (57), warga RT 28/RW 9, dan Titus Bistolen menolak dengan alasan belum ada kepastian ganti rugi atau relokasi lahan yang jelas dari pemerintah. (Putra. 2016. Warga kolhua minta). Hal ini kemudian disertai ancaman kepada aparat dan pengusiran terhadap aparat pemerintah saat melakukan kunjungan ke lokasi bendungan beserta beberapa pejabat daerah pemerintah Kota Kupang. (Nastiti, Pamuji. 2017. Proyek bendungan). Dengan adanya penolakan ini Pemerintah Kota Kupang akhirnya mengalihkan pendekatan pembebasan lahan pada pihak Provinsi NTT. Sebelumnya kewenangan pembebasan lahan merupakan tugas dari Pemerintah Kota Kupang, sedangkan Pemerintah Provinsi NTT menjembatani antara Pemerintah Kota Kupang dan Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan Bendungan Kolhua.

Fase ketiga(2018-2022), pada tahun 2018 terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTT. Gubernur terpilih Viktor Bungtilu Laiskodat saat itu menyatakan sikap tidak merestui pembangunan bendungan dengan memperhatikan lahan bendungan sebagai tanah adat masyarakat. Gubernur mengatakan keberadaan bendungan Kolhua akan menggusur wilayah suku Helong yang adalah etnik pemilik Kota Kupang serta struktur bendungan yang dapat membahayakan jiwa penduduk kota Kupang karena letaknya di ketinggian. Hal ini bersamaan dengan dikeluarkannya surat penghentian sementara perencanaan pembangunan bendungan. Pada saat itu sikap pemerintah Provinsi sangat kontras bertentangan dengan sikap gubernur sebelumnya Frans Lebu Raya yang sangat mendukung pembangunan bendungan (Mangngi, Stef. 2017. Bendungan kolhua solusi). Dengan adanya dukungan berupa penolakan dari gubernur tersebut disertai dengan surat keputusan menghentikan sementara pembangunan bendungan kemudian dialihkan ke lokasi lain di kabupaten lain di NTT. Konflik kemudian berlanjut setelah 3 tahun masa kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yakni pada bulan Juni 2021. Gubernur yang sebelumnya menolak keras pembangunan bendungan dengan alasan mendukung warga, kemudian menyatakan mendukung pembangunan Bendungan Kolhua dan akan melakukan pendekatan dengan masyarakat secara adat melalui surat dukungan yang dikeluarkan oleh gubernur (Tihu, Intho. 2021. Bendungan kolhua segera). Kepala Dinas PUPR Propinsi NTT mengatakan bahwa, pemerintah pusat melalui Dirjen Sumber Daya Alam Propinsi NTT sudah bertemu dengan Gubernur NTT dan secara tegas mengatakan pembangunan Bendungan

Kolhua merupakan program nasional dan ini permintaan langsung dari Presiden karena NTT mendapat 8 bendungan yang salah satunya adalah Kolhua. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat juga telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor BU.600/04/PUPR/IV/2021 terkait dukungan rencana pembangunan bendungan Kolhua di Propinsi NTT (Tim RN. 2021. Serikat tani). Perubahan kebijakan ini kemudian direspon dengan adanya Deklarasi Penolakan pada 4 Juli 2021, Ketua Serikat Tani Kolhua Yosep Bistolen yang mewakili aspirasi masyarakat Kolhuadengan tegas menolak memberikan lahan tersebut kepada pemerintah isi tuntutan dalam deklarasi itu jelas: (1) Segera mencabut Perda Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang (2) Meminta kepada Walikota Kupang, Gubernur NTT untuk menghapus rencana pembangunan Kolhua dari agenda atau program nasional. (3) Menghentikan segala pemberitaan dan sosialisasi terhadap bendungan Kolhua karena sangat mengganggu Serikat Tani Kolhua dan Etnis Helong Kolhua(Sanda, Asis. 2021. Sampai titik darah).Awal tahun 2022, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan rencana konstruksi bendungan Kolhua akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Dalam website resmi Kementerian PUPR dijelaskan bahwa studi kelayakan sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan studi analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan sertifikasi desain PUPR. 2022. Pemerintah Kota Kupang lalu mengeluarkan surat undangan sosialisasi bagi warga Kelurahan Kolhua. Sosialisasi dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II bersama Pemerintah Kota (Pemerintah kota) Kupang di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Kamis 7 April 2022, namun ada sebagian warga yang menolak menghadiri undangan tersebut. Warga memilih mendatangi kantor Lurah untuk mengembalikan undangan dan menyatakan komitmen mereka menolak pembangunan bendungan itu. Mereka tidak ingin lahan pertanian mereka yang produktif dan diolah turun-temurun hilang. Selain lahan hilang, Yunus menilai proses pembangunan itu sengaja dilakukan untuk menghilangkan etnis Helong di Kota Kupang (Petrus, Ananias. 2022. Puluhan KK).Pada Senin, 11 April 2022 ratusan warga dari Suku Helong yang berdomisili di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menolak pembangunan Bendungan Kolhua. Dalam aksinya, mereka dikoordinasikan oleh Yosep Bistolen selaku ketua Serikat Tani Kolhua, Dance Bistolen (perwakilan RT), Maksi Melianus Buifena dan Alexis Bistolen.Warga dari marga Laiskodat, Bistolen, dan Foenay selaku perwakilan Suku Helong tetap bersikap tegas menolak pembangunan itu di tanah leluhur mereka. Proses pembangunan itu sengaja dibangun untuk menghilangkan etnis Helong yang ada di Kota Kupang. Sementara itu, perwakilan warga, Maksi Melianus Buifena menambahkan, pihaknya meminta Lurah dipindahkan karena tidak berpihak kepada warga (Bere, Sigiranus. 2022. Tolak pembangunan).Hingga saat ini Pemerintah Kota Kupang bersama Pemerintah Provinsi NTT seperti belum menemukan solusi tepat guna menengahi rencana pembangunan bendungan Kolhua dan penolakan warga.Berdasarkan pemaparan di atas dengan menggunakan teori konflik Fisher dan teori akar konflik Dorsey peneliti mencoba menganalisa faktor-faktor penyebab akar konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat adat Helong dalam perencanaan Bendungan Kolhua. Sehingga menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan Bendungan Kolhua berlangsung lama danberkepanjangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan (Neuman, 2006). Dalam hal ini penelti akan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat.Penelitian

ini dilakukan secara eksplanatif dengan menguji variable-variabel penelitian yang digunakan sebagai hipotesis. Fokus dalam penelitian ini menganalisa hubungan-hubungan antara variabel (Singarimbun, 1981). Penelitian dilakukan dengan melakukan riset secara eksploratif dan deskriptif tentang bagaimana konflik ini terjadi dan belum terselesaikannya penyebabnya yang melatarbelakangi peristiwa atau fenomena konflik yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menghubungkan dan mencari sebab akibat antara beberapa variabel yang akan diteliti. Untuk itu peneliti membutuhkan kerangka teori dan konsep yang akan digunakan peneliti untuk membantu menganalisa dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengidentifikasian data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi secara langsung di lapangan terhadap orang-orang atau pihak yang terlibat dalam permasalahan disertai dengan data dokumentasi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan melakukan metode wawancara, pengumpulan data primer/ sekunder, pengklasifikasian data menurut variabel teori kemudian menganalisis hasil berdasarkan temuan dari variabel penyebab konflik tersebut. Peneliti mengolah data maupun informasi yang bersumber dari penelitian lapangan, dari narasumber maupun dari kajian literatur. Secara umum peneliti menerapkan langkah-langkah analisis umum yang ditemukan dalam desain tertentu. Langkah-langkah tersebut di antaranya yaitu: mengatur dan mempersiapkan data, pengenalan awal data dan informasi, mengkodekan dan mengklasifikasikan data, menyajikan data, kemudian menafsirkan temuan. Hasil tafsiran tersebut dapat dibandingkan dengan literatur dan teori yang ada, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan/atau memberikan saran perbaikan (Cresswell, 2016 : 261)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam membahas faktor-faktor penyebab konflik yang terjadi dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bendungan Kolhua memakai teori Dorsey dalam menganalisis faktor penyebab konflik. Beberapa penyebab konflik menurut Dorsey (1986) dalam Mitchell, B (2000) adalah (1) Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman, (2) Perbedaan Nilai, (3) Perbedaan Kepentingan dan (4) Persoalan Pribadi atau Latar Belakang Sejarah (Dorsey, 1986). Dalam teori Dorsey peneliti menganalisisnya dalam perspektif pihak-pihak yang berkonflik, yakni perspektif pemerintah daerah dan perspektif masyarakat adat dengan mengkaji keempat variabel yang dimaksud.

Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman

Terdapat perbedaan pengetahuan dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat adat dimana pemerintah menganggap masyarakat pada awalnya menyetujui. Jika merujuk pada jejak sejarahnya, wilayah perencanaan bendungan sudah ada patok/pilar batas dan luas wilayah yang sudah diketahui, berarti masyarakat pada dasarnya tidak menolak pembangunan. Karena jika mereka benar-benar menolak maka tidak mungkin mereka membiarkan pemerintah mengukur dan mematok kawasan perencanaan bendungan tersebut. Maka dari itu tentu tidak semua masyarakat adat menolak pembangunan namun ada juga yang menyetujui. Pemerintah juga menganggap bahwa berdasarkan survey, Kolhua merupakan wilayah yang paling potensial karena berada di dataran paling tinggi di Kota Kupang sehingga sangat efisien dalam operasional bahkan juga berada di cekungan yang aman untuk di bangun bendungan.. Sementara dari perspektif masyarakat adat Helong mereka menilai bahwa Rencana pemerintah membangun bendungan Kolhua ini sudah terjadi sejak tahun 1993. Selain itu berdasarkan survey awal oleh pemerintah dan tim ahli dari Jepang. Ditemukan bahwa struktur dan jenis tanah di Kolhua merupakan tanah yang rawan longsor dan berbahaya apabila dibangun bendungan. Setelah hasil survey ini diumumkan ke masyarakat maka rencana ini langsung ditolak oleh

pendahulu atau leluhur masyarakat adat Helong dengan alasan jika membangun bendungan di kawasan tersebut maka dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka. Begitupun bagi mereka lahan yang diambil adalah lahan produktif yang dijadikan sawah, lahan hortikultura, dan lahan sumber pakan ternak yang tentu lahan tersebut menjadi sandaran hidup masyarakat petani di Kolhwa. Karena adanya penolakan ini maka pembangunan ini digeser ke Kabupaten Kupang yang kini telah dibangun Bendungan Tilong. Namun dalam perjalanannya, tahun 2008 pemerintah kembali mencanangkan pembangunan bendungan ini lagi karena sudah dimasukkan dalam Musrenbang Nasional pada saat Walikota dipimpin oleh Daniel Adoe. Namun saat itu tetap ada penolakan dari masyarakat dengan bersurat dan berdemonstrasi disertai aksi tanam-menanam di kebun untuk menunjukkan pada pemerintah bahwa lahan ini bukan lahan tidur dan merupakan lahan produktif yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka sampai pada anak cucu. Kemudian pada tahun 2012 pada saat pemerintahan Walikota Kupang Jonas Salean, perencanaan pembangunan Bendungan Kolhwa ini kembali gencar dicanangkan sampai ada korban dari masyarakat atau hampir terjadi konflik. Dimana pemerintah menurunkan polisi, tentara dan Satpol PP untuk mengamankan megaproyek ini. Namun masyarakat terus berjuang mempertahankan lahan ini dengan cara-cara mereka dengan melakukan demonstrasi dan unjuk rasa kepada pemerintah serta terus melakukan pendudukan dan aksi tanam-menanam di wilayah tersebut dengan mengadakan berbagai ritual adat yang menandai bahwa lahan ini merupakan lahan suku asli Helong, yang artinya jika terealisasi maka dengan sendirinya identitas suku Helong akan tergeser secara adat karena sebagian lahan mereka telah diambil. Menurut masyarakat pada dasarnya keseluruhan warga adat menolak. Hanya saja ada beberapa pihak yang karena adanya kesenjangan sosial sehingga menyetujui pembangunan, meskipun begitu luasan tanah mereka tidak signifikan. Masyarakat adat Helong menganggap bahwa pemerintah selama ini tidak pernah menyampaikan secara jelas apa yang menjadi solusi pemerintah bagi masyarakat, belum pernah ada dialog dua arah yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat.

Perbedaan Nilai

Adanya perbedaan nilai juga menjadi salah satu penyebab konflik yang terjadi di masyarakat. Fisher *et al.* (2001) mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Paul Conn dalam *Conflict and Decision Making* (1971) mengatakan bahwa kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Pemerintah menganggap dengan terbangunnya bendungan akan menciptakan potensi pengembangan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar dengan adanya cadangan air minum, air untuk pertanian/ peternakan, pariwisata dan menunjang aktifitas warga Kota Kupang. Pembangunan Bendungan Kolhwa juga dinilai sebagai bendungan yang efisien dan ekonomis karena dari sisi pemanfaatan dan operasional tidak memerlukan banyak biaya karena letaknya ditinggikan. Pengairan bendungan Kolhwa hanya membutuhkan tekanan gravitasi dan sedikit pompa air sehingga hanya mengeluarkan sedikit biaya dalam mengoperasikan bendungan dibanding jika dibangun di tempat lain. Sementara masyarakat memandang bahwa dengan mempertahankan lahan mereka akan menjaga nilai-nilai kesukuan yang sudah menjadi warisan leluhur mereka bertahun-tahun. Mempertahankan wilayah perencanaan bendungan juga bagi mereka merupakan kewajiban karena Kolhwa merupakan kampung adat terakhir bagi mereka di Kota Kupang. Jika sampai dibangun bendungan maka akan menggeser bahkan menghilangkan kampung halaman bahkan identitas mereka sebagai suku asli Helong di Kota Kupang. Pertanian dan perkebunan yang menjadi penghidupan warga

selama ini juga akan hilang jika dibangun bendungan. Masyarakat juga menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian dan perkebunan di wilayah perencanaan bendungan yang mana menurut mereka delapan puluh persen dari masyarakat adat Helong di Kolhua adalah petani. Lagipula menurut mereka pernah ada penelitian tahun 1993 dari Jepang dan ITB (namun tidak ada bukti yang diberikan kepada mereka). Penelitian ini diumumkan ke masyarakat bahwa struktur tanah di Kolhua ini tidak memungkinkan membangun bendungan. Karena tanah ini adalah tanah yang gampang longsor. Hal ini terbukti sewaktu bencana badai seroja tahun 2021 lalu banyak lahan yang longsor dan ada beberapa warga yang mengungsi. Dapat dikatakan bahwa perbedaan nilai antara pemerintah daerah dan masyarakat ini karena terdapat ketidaksetujuan pada tujuan akhir dari masing-masing pihak yang mempengaruhi mereka dalam menginterpretasikan nilai. Seperti yang disampaikan Stoner bahwa konflik merupakan ketidaksetujuan antara individu ataupun kelompok dalam organisasi karena kebutuhan dari sumber daya yang terbatas, perbedaan status, tujuan, kepentingan, atau budaya (Stoner, 1989).

Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan juga menjadi faktor penyebab adanya konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat Helong. (Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin, 2009) memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan berbagai tingkat kompleksitas. Konflik berdasarkan kepentingan juga dapat ditafsirkan sebagai konflik dari perspektif politik dimana konflik terjadi dalam mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting bagi masing-masing pihak (Santosa, 2001)

Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kepentingan terhadap pembangunan bendungan karena jika terbangun akan menunjang kebutuhan masyarakat Kota Kupang terhadap krisis air bersih yang selama ini menjadi masalah utama warga Kota Kupang. Terbangunnya bendungan juga akan memunculkan berbagai potensi terhadap pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Kota Kupang pada umumnya sebagai sumber air tentu akan bermanfaat bagi irigasi, perikanan, konservasi air baku dan tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan potensi bendungan. Selain itu dengan terbangunnya bendungan akan menambah destinasi wisata baru bagi Kota Kupang yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata dapat mendatangkan pendapatan dan lahan usaha baru bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Kupang. Sedangkan disisi lain masyarakat memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan lahan produktif pertanian dan perkebunan yang selama ini mereka kelola sebagai sumber mata pencaharian mereka. Dampak pembangunan bendungan Kolhua ini menurut mereka akan sangat besar terhadap kira-kira 138 KK (Kepala Keluarga) disana dikarenakan 80% mereka merupakan petani. Dimana suplay sayur segar dan buah-buahan di Kota Kupang ini juga salah satunya berasal dari Kolhua. Disini juga masih ada peternakan dengan metode paronisasi baik itu kambing, sapi dan babi dengan pakan ternak diambil dari sisa pertanian dan tanaman di lahan-lahan tersebut. Kalo bendungan ini terealisasi dengan sendirinya mata pencarian mereka hilang. Menurut mereka juga, melalui hasil pemanfaatan lahan ini, mereka dapat menghidupi dan menyekolahkan anak-cucu mereka hingga dapat bersekolah tinggi. Mereka juga mempertahankan wilayah adat tersebut sebagai sebuah kepentingan kolektif masyarakat adat Helong yang juga membutuhkan adanya kampung adat yang melambangkan identitas kesukuan mereka sebagai suku

asli di Kota Kupang. Pada wilayah tersebut juga ditemukan tujuh titik pemakaman adat leluhur mereka yang bagi mereka tidak dapat dipindahkan dan sudah lama menjadi lokasi pekuburan keluarga. Menurut mereka jika pemerintah mencari sumber air bersih sebenarnya di Kupang masih ada alternatif-alternatif lain untuk sumber air salah satu contohnya saat jaman kepemimpinan Walikota Jefri Riwakore (2017-2022), pemerintah memanfaatkan kali dendeng di Kota Kupang untuk dibendung sebagai penampungan air bersih dan masih banyak sumber-sumber air lainnya yang dapat dibendung untuk keperluan air bersih. Dengan kepentingan yang berbeda ini maka sejalan dengan yang dikatakan Johnson dan Duinker (1993) konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah, serta bagian yang menyatu sejak kehidupan ada (Johnson dan Duinker, 1993: 17)

Persoalan Pribadi atau Latar Belakang Sejarah

Latar belakang sejarah dan pribadi juga menjadi salah satu faktor yang memicu konflik dan penolakan masyarakat. Dari hasil penelitian terdapat pengalaman-pengalaman dimasa lalu yang kurang menyenangkan sehingga memicu adanya konflik yang berlandaskan ketidakpercayaan dan sakit hati dimasa lalu. Sesuai informasi yang didapatkan peneliti bahwa menurut pemerintah awal bantuan dari pemerintah pusat terkait alokasi anggaran perencanaan pembangunan Bendungan Kolhua pada masa awal pencaangan ternyata dialihkan penggunaannya menjadi anggaran yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang. Hal tersebut diketahui setelah adanya rapat mendengarkan aspirasi pada tahun 2013 oleh Walikota Kupang yang saat itu dipimpin oleh Jonas Salean yang mana saat itu masyarakat menyampaikan ketersinggungan mereka terkait kenapa anggaran pembangunan Bendungan Kolhua tersebut bisa bergeser ke pembangunan Bendungan Tilong. Tetapi pemerintah juga menjelaskan bahwa pada saat itu ada program dari pemerintah pusat terkait dengan penyediaan air baku untuk pengairan atau irigasi untuk tanah-tanah pertanian di Kabupaten Kupang maka dana saat itu di dorong ke Kabupaten Kupang untuk pembangunan Bendungan Tilong. Jadi menurut pemerintah Kota Kupang pada awalnya masyarakat sepakat mendukung pembangunan namun karena adanya ketersinggungan pada waktu itu sehingga timbul sakit hati hingga terjadi penolakan. Kemudian pada saat Walikota Daniel Adoe memimpin, pencaangan kembali bendungan yang oleh pemerintah namun hal ini juga berujung pada penolakan kembali pembangunan bendungan. Bahkan saat itu masyarakat ada yang diancam serta dilaporkan untuk dipenjarakan oleh Walikota Kupang Daniel Adoe karena melakukan aksi yang menyinggung walikota. Pemerintah juga menyatakan bahwa masyarakat tersinggung serta terganggu dengan penyampaian informasi pembangunan bendungan Kolhua melalui media massa dan elektronik selama ini. Hal ini dianggap oleh masyarakat memprovokasi warga Kolhua dan warga Kota Kupang secara keseluruhan yang memberitakan aksi penolakan masyarakat adat Helong di Kolhua. Mereka seolah tidak berkontribusi terhadap pembangunan di Kota Kupang. Bagi pemerintah masyarakat yang terus menerus melakukan penolakan berkepanjangan terhadap pembangunan ini menimbulkan adanya ketidakpercayaan pemerintah yang membuat pemerintah seolah mendiamkan permasalahan ini dan tidak mau melakukan berbagai inisiasi untuk sementara waktu karena masyarakat juga tidak pernah mau diajak berdialog. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota seolah saling menunggu adanya inisiatif dari masing-masing pihak untuk keputusan melanjutkan ataupun menghentikan pembangunan. Walikota Kupang Jefri Riwu Kore saat meminta kejelasan sikap dari masyarakat adat Kolhua yang menolak pada akhirnya tidak lagi mau membicarakan terkait permasalahan bendungan. Ia lebih memilih untuk menunggu keputusan dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang juga merupakan masyarakat adat Kolhua. Hal ini kemudian menambah

ketidakpastian dari sisi pemerintah dan masyarakat terkait kelanjutan pembangunan bendungan yang telah berkonflik selama bertahun-tahun.

Sedangkan masyarakat adat sendiri menuturkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan pemerintah di masa lalu dimana pemerintah dianggap tidak menyampaikan rencana dan maksud pembangunan bendungan Kolhua secara terbuka dan jelas. Masyarakat adat tersinggung karena pemerintah kerap memakai media massa dan elektronik untuk menyuarakan pembangunan Bendungan Kolhua tanpa adanya konfirmasi persetujuan dari masyarakat adat Helong di Kolhua, seakan masyarakat telah menyetujui pembangunan bendungan padahal tidak hal ini membuat kemarahan masyarakat yang kaget terhadap informasi yang beredar dan memunculkan aksi-aksi penolakan. Pemerintah juga menurut masyarakat tidak menyampaikan dengan jelas solusi yang ditawarkan terkait dengan lahan adat yang akan tergeser bahkan hilang jika terbangunnya bendungan. Begitupun dengan lahan pertanian yang dijanjikan untuk diganti sawah namun secara konkrit tidak disampaikan, apalagi di Kota Kupang sendiri untuk mencari lahan sawah sudah sangat terbatas bahkan hampir tidak dapat ditemukan lagi. Hal inilah membuat masyarakat menjadi sangsi apakah pemerintah mengutarakannya secara benar ataukah hanya sebatas janji dari pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan bendungan. Masyarakat adat Helong di Kolhua juga mencontohkan beberapa pengalaman buruk masyarakat di daerah lain di Nusa Tenggara Timur yang memberikan lahan mereka untuk dibangun bendungan, yang kini tidak dapat menikmati hasil pembangunan bendungan sesuai janji yang disampaikan pemerintah sebelum membangun. Hal ini kemudian menjadi suatu preseden yang membuat trauma dan ketakutan masyarakat untuk menyerahkan lahannya pada pembangunan bendungan.

Keterkaitan antar variabel faktor penyebab

Berdasarkan analisis faktor penyebab konflik perencanaan Bendungan Kolhua antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat Helong. Peneliti menemukan adanya keterkaitan antara variabel-variabel penyebab konflik. Perbedaan Pemahaman terjadi karena adanya pemahaman dari pemerintah karena menganggap daerah Kolhua merupakan daerah yang potensial terhadap pembangunan bendungan. Sedangkan masyarakat menganggap daerah ini tidak cocok untuk dibangun bendungan selain karena menurut survey lahan ini berbahaya karena rawan longsor juga berpotensi menghilangkan lahan pertanian dan persawahan yang sudah terbangun dengan baik. Daerah Kolhua yang menurut pemerintah cukup potensial ini kemudian menjadikannya memiliki nilai lebih dalam hal letak yang strategis karena memiliki efisiensi dan ekonomis dalam mengoperasikannya sebagai sumber air dan juga membawa manfaat besar bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di Kupang. Sedangkan masyarakat menilai lahan yang tidak cocok dibangun bendungan ini akan menghilangkan lahan pertanian dan persawahan mereka sehingga berpotensi merugikan mereka kelak di masa depan. Dari sini kita melihat bahwa keterkaitan antara faktor perbedaan pemahaman kemudian mengarah pada perbedaan interpretasi nilai dan kepentingan. Persoalan pribadi dan latar belakang sejarah juga bersumber dari pengalaman dimasa lalu antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dimana masyarakat merasa tersinggung program pembangunan bendungan Kolhua dialihkan ke Bendungan Tilong, Kabupaten Kupang. Hal ini diakibatkan oleh kurang baiknya penyampaian informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat yang menjadi penyebab dari perbedaan pemahaman. Adanya komunikasi yang tidak tersampaikan dengan benar dan jelas disertai adanya persoalan masa lalu yang kurang menyenangkan ini menimbulkan penolakan masyarakat yang mengganggu berjalannya komunikasi yang baik sehingga memunculkan perbedaan

interpretasi. Komunikasi yang tidak tersampaikan dengan jelas ini membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah daerah sehingga terhambat untuk proses sosialisasi dan mediasi. Pada dasarnya faktor pemahaman dan pengetahuan ini berhubungan timbal balik dengan adanya persoalan pribadi dan latar belakang sejarah antara kedua pihak ini.

Konflik dalam semua situasi selalu mengandung unsur positif dan negatif sebagaimana pendapat Lewis Coser (1956: 23). Dimana sifat positif konflik adalah antar pihak terjadi komitmen atau kesepakatan untuk sebuah resolusi dan solusi yang bisa berwujud pernyataan bersama (*declaration*) dalam kesepahaman (*understanding*) tentang suatu hal yang menjadi sumber konflik serta bersifat negatif jika konflik merupakan suatu hal kontraproduktif yang tidak terselesaikan. Melihat situasi yang terjadi di lapangan peneliti dapat mengatakan bahwa konflik yang terjadi dalam perencanaan Bendungan Kolhua ini dapat dikatakan mengandung unsur negatif karena konflik tidak dapat mencapai komitmen antarpihak untuk sebuah konsensus atau kesepakatan dalam jangka waktu yang sangat panjang.

SIMPULAN

Konflik pemerintah daerah dan masyarakat adat Helong terjadi secara berkepanjangan karena adanya beberapa faktor penyebab. Sejalan dengan teori Dorsey (1986) Konflik ini juga didasarkan atas perbedaan pengetahuan dan pemahaman, perbedaan nilai, perbedaan kepentingan dan adanya persoalan pribadi atau latar belakang sejarah.

Perbedaan pengetahuan dan pemahaman, pemerintah daerah menilai wilayah ini cocok dan potensial digunakan untuk pembangunan bendungan karena letaknya yang strategis namun masyarakat adat Helong menilai bahwa lahan ini tidak cocok dari segi lahan yang rawan longsor dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Helong. Hal ini terjadi karena kurang tersampainya maksud dan tujuan pembangunan Bendungan Kolhua kepada masyarakat adat. Sedangkan disisi lain masyarakat adat perlu mengetahui apakah tanah adat mereka ikut terdampak atau tidak. Masyarakat adat perlu juga mengetahui solusi dan saran dari pemerintah sesuai dengan rencana pembangunan sehingga pemerintahpun dapat membangun tanpa mengganggu tanah adat masyarakat Helong.

Perbedaan nilai, disebabkan karena pemerintah dan masyarakat adat pada dasarnya memiliki penilaian yang berbeda terhadap pemanfaatan tanah dimaksud. Pemerintah melihat lahan perencanaan bendungan ini sebagai suatu potensi untuk mengembangkan ekonomi lewat terbangunnya bendungan yang menunjang aktifitas warga Kota Kupang. Sedangkan masyarakat adat lebih menilai lahan ini sebagai warisan adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan harus dipertahankan sampai kapanpun.

Perbedaan kepentingan, terkait perbedaan kepentingan pada dasarnya pemerintah lebih melihat pembangunan bendungan ini pada kebutuhan masyarakat Kota Kupang yang mengalami krisis air bersih. Sedangkan masyarakat melihat ini sebagai kepentingan mempertahankan lahan tempat mata pencaharian mereka yang telah menghidupi mereka bertahun-tahun serta juga mempertahankan identitas kesukuan masyarakat adat Helong yang merupakan suku asli Kota Kupang yang juga berkampung halaman di daerah sekitar perencanaan Bendungan Kolhua.

Adanya persoalan pribadi atau latar belakang sejarah, diketahui bahwa adanya ketersinggungan dan kesalahpahaman serta buruknya komunikasi dimasa lalu menjadi penyebab dari penolakan masyarakat adat Kolhua dalam perencanaan pembangunan bendungan Kolhua. Masyarakat merasa pemerintah tidak terbuka dan tidak jujur terhadap perencanaan pembangunan

bendungan beserta solusi yang mereka tawarkan sehingga tanah adat, pertanian dan matapencaharian mereka tidak serta merta terancam hilang atau tergantikan. Ditambah oleh ketersinggungan masyarakat terhadap pemberitaan pembangunan bendungan yang selalu digaungkan di media tanpa persetujuan masyarakat. Juga adanya trauma dan ketakutan masyarakat akan bernasib sama seperti daerah lain di NTT yang dibangun bendungan tapi tidak dapat merasakan manfaatnya bagi kehidupan mereka,

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dorcey, A. H. J (1986). *Bargaining in the governance of pacific coastal resources: Research and reform*.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D., Smit h, R., & William, S. (2001). *Mengelola konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Kartikasari SN, MD Tapilatu, R Maharani, dan DN Rini, Penerjemah: Kartikasari SN, editor. Jakarta (ID): The British Council.
- Johnson, P. J., & Duinker, P. N. (1993). *Beyond dispute: collaborative approaches to resolving natural resource and environmental conflicts*. Thunder Bay, Ont.: School of Forestry, Lakehead University.
- Mitchell, B., B. Setiawan, dan D.H. Rahmi. (2000). *Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach, Sixth Edition*. Jakarta: Index.
- Pruit, D.G. dan J.Z. Rubin. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ross, M. G. (1956). COSER. The Functions of Social Conflict (Book Review). *Social Forces*, 35(1), 378.
- Santosa, Edi. (2001). *"Konflik Sosial dan Lingkungan."* *Himpunan Proceeding Seminar Potensi Konflik SARA Kota Semarang*. Manajemen Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1981). *Metode Penelitian Survei (Edisi Kedua)*. Jogjakarta: Pusat penelitian dan studi kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Conn, P. H. (1971). *Conflict & Decision Making: An Introduction to Political Science*. HarperCollins Publishers.
- Stoner, C. R. (1989). The foundations of business ethics: Exploring the relations. *SAM Advanced Management Journal*, 54(3), 38.

Internet

- Ananias Petrus. 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/puluhan-kk-suku-helong-di-kupang-tolak-pembangunan-bendungan-kolhua.html>
- Danu, Mahesa. 2013. <https://www.berdikarionline.com/front-rakyat-kolhua-tolak-pembangunan-bendungan/>
- Intho Herison Tihu. 2021. <https://timexkupang.com/2021/06/03/bendungan-kolhua-segera-dibangun-kadis-pupr-sudah-direstui-gubernur-ntt/>
- Kelen, Yoseph A. 2015. <https://www.beritasatu.com/nasional/278248/atasi-krisis-air-pemerintah-akan-bangun-6-bendungan-di-ntt>
- Mesak, Zaimond. 2013. <https://www.berdikarionline.com/ratusan-warga-kolhua-tolak-pembangunan-bendungan/>
- Mangngi, Stef Mira. 2017. <https://rakyatntt.com/bendungan-kolhua-solusi-jangka-panjang-atasi-krisis-air-bersih/>
- Nastiti, Pamuji Tri. <https://bali.bisnis.com/read/20170104/538/776525/proyek-bendungan-kolhua-di-kota-kupang-terganjal-urusan-politik>.
- Putra. <https://kupang.tribunnews.com/2016/03/04/warga-kolhua-minta-pemerintah-jujur-soal-bendungan>. Pos Kupang.

- Ryan Nong. 2021. <https://kupang.tribunnews.com/2021/06/03/pembangunan-bendungan-kolhua-kecamatan-maulafa-akan-dilanjutkan>
- Seo,Yohanes. 2015. <https://nasional.tempo.co/read/696484/takut-ditenggelamkan-warga-tolak-pembangunan-bendungan-kolhua/>
- Sigiranus Marutho Bere. 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/12/104946378/tolak-pembangunan-bendungan-kolhua-warga-jangan-bongkar-tanah-leluhur-kami?page=all>.
- TIM RN. 2021. <https://radarntt.co/lingkungan/2021/serikat-tani-dan-warga-helong-tolak-pembangunan-bendungan-kolhua/>